Proseding Pengabdian Kepada Masyarakat
Public Internship Symposium; Prodi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-ISSN: 3032-0933, Volume: 5 Nomor: 2

PENDAMPINGAN PENGAMBILAN SIDIK JARI MANUAL DALAM PROSES REGISTRASI OT BARU DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I SURABAYA

Risa Amelia[1], **Indah Murti**[2]
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ameliarisaaml@gmail.com[1], endah@untag-sby.ac.id[2]

ABSTRAK

Ketertiban administrasi dalam sistem pemasyarakatan merupakan pilar utama yang menentukan kualitas tata kelola lembaga negara yang menangani orang berhadapan dengan hukum. Registrasi orang tahanan baru, khususnya proses pengambilan sidik jari manual, menjadi titik kritis yang membutuhkan ketelitian, prosedur yang terstandarisasi, dan sumber daya manusia yang memadai. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi petugas Unit Registrasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya dalam pelaksanaan pengambilan sidik jari manual sebagai bagian dari proses registrasi administratif orang tahanan baru. Metode pelaksanaan mencakup tujuh tahap berurutan: observasi lapangan, koordinasi dengan petugas, persiapan alat dan bahan, pendampingan langsung pengambilan sidik jari, pemeriksaan kualitas cetakan, pencocokan data identitas, serta dokumentasi dan pengarsipan. Kegiatan dilaksanakan selama periode magang mahasiswa Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan sasaran seluruh orang tahanan baru yang menjalani proses registrasi masuk. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa magang mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempercepat proses registrasi, meningkatkan ketertiban administrasi, dan mendukung akurasi data identitas orang tahanan. Kegiatan ini menegaskan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintah memberikan nilai tambah signifikan bagi kualitas pelayanan publik.
Kata kunci: Sidik jari manual, registrasi tahanan, administrasi publik, identifikasi biometrik, rumah tahanan negara

ABSTRACT

Administrative order in the correctional system is a primary pillar that determines the quality of governance in institutions handling persons in conflict with the law. The registration of newly detained persons, particularly the manual fingerprint collection process, represents a critical juncture requiring precision, standardized procedures, and adequate human resources. This community service activity aims to assist officers of the Registration Unit of Class I State Detention Center (Rutan) Surabaya in implementing manual fingerprint collection as part of the administrative registration process for newly detained persons. Implementation methods comprised seven sequential stages: field observation, coordination with registration officers, preparation of tools and materials, direct assistance in fingerprint collection, print quality inspection, identity data verification, and documentation with archiving. Activities were conducted during the internship period of students from the Public Administration Study Program, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, targeting all newly detained persons undergoing the admission registration process. Results indicate that internship students made tangible contributions in accelerating the registration process, improving administrative order, and supporting the accuracy of detainee identity data. This activity affirms that collaboration between higher education institutions and government agencies yields significant added value to the quality of public services.
Keywords: *Manual fingerprint, detainee registration, public administration, biometric identification, state detention center*

PENDAHULUAN

pengelolaan identitas individu dalam sistem peradilan pidana telah menjadi perhatian utama lembaga-lembaga internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners yang diperbarui menjadi Nelson Mandela Rules pada tahun 2015 dan dikukuhkan kembali oleh Resolusi Majelis Umum PBB 70/175 tahun 2020, menegaskan bahwa setiap lembaga penahanan wajib memiliki sistem pencatatan dan registrasi yang akurat, komprehentif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Mendela Rules, 2016). Prinsip ini menjadi rujukan bagi seluruh negara, termasuk Indonesia, dalam membangun sistem pemasyarakatan yang tertib, manusiawi, dan berorientasi pada hak asasi manusia.

Identifikasi biometrik merupakan salah satu kontribusi teknologi terbesar bagi sistem keamanan dan penegakan hukum global. Di antara berbagai modalitas biometrik yang berkembang saat ini, sidik jari tetap menjadi metode yang paling banyak digunakan karena keunikannya yang telah terbukti secara ilmiah setiap individu memiliki pola sidik jari yang berbeda, bahkan pada kembar identik sekalipun (Maltoni et al., 2022). (Oktianatasari et al., 2008) mencatat bahwa sistem identifikasi sidik jari otomatis (Automated Fingerprint Identification System/AFIS) kini digunakan di lebih dari 100 negara untuk keperluan penegakan hukum, imigrasi, dan pengelolaan tahanan. Namun, di banyak negara berkembang, metode manual masih tetap dipertahankan sebagai lapis cadangan yang penting, terutama ketika infrastruktur digital belum sepenuhnya tersedia atau mengalami gangguan. Kenyataan ini menjadikan kemampuan pengambilan sidik jari manual tetap relevan dan perlu dipertahankan sebagai kompetensi inti petugas registrasi.

Di berbagai negara maju maupun berkembang, pengambilan sidik jari dalam proses booking atau registrasi tahanan telah menjadi prosedur baku yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam sebuah laporan dari Office of Justice Programs Amerika Serikat, disebutkan bahwa kegagalan dalam memperoleh dan menyimpan cetakan sidik jari yang terbaca dengan baik dapat menimbulkan serangkaian permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana, mulai dari kesalahan identifikasi, kebocoran data, hingga pembebasan terdakwa yang keliru (Soediro, 2019). Fakta ini menegaskan bahwa kualitas teknis pengambilan sidik jari bukan persoalan sepele, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang langsung dan nyata.

Realitas global tersebut menemukan konteksnya di Indonesia, di mana sistem pemasyarakatan mengelola ratusan unit pelaksana teknis yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menggantikan UU No. 12 Tahun 1995, membawa pergeseran paradigma yang signifikan dari pendekatan yang semata bersifat punitif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan berbasis penghormatan hak asasi manusia. Salah satu implementasi paradigma ini adalah kewajiban registrasi yang diatur dalam Pasal 36 undang-undang tersebut, yang mewajibkan setiap lembaga penahanan mendaftarkan orang tahanan baru secara sistematis dan terstandarisasi mencakup data biometrik sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses penerimaan.

Kewajiban tersebut diterjemahkan ke dalam tataran operasional melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang memuat ketentuan prosedur penerimaan dan registrasi tahanan baru secara terperinci. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memperluas tanggung jawab ini dengan mewajibkan seluruh instansi pemerintah termasuk lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan berkeadilan kepada setiap individu yang dilayani**.** Dengan demikian, proses registrasi tahanan bukan hanya urusan keamanan internal lembaga, melainkan juga kewajiban pelayanan publik yang terukur dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Untuk mendukung kewajiban administratif tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengembangkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sejak 2014 sebagai infrastruktur digital yang mengintegrasikan data seluruh tahanan dan narapidana secara nasional dari proses penerimaan hingga pembebasan. (Nurohma, 2023) dalam kajian yang dipublikasikan jurnal Private Law Universitas Mataram menjelaskan bahwa SDP merupakan wujud nyata dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam sektor pemasyarakatan, yang bertujuan mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Yang perlu dicermati adalah bahwa kualitas seluruh data dalam SDP sangat bergantung pada akurasi input data pada saat registrasi awal, termasuk data biometrik sidik jari. Artinya, secanggih apapun sistem digital yang dibangun di atasnya, kualitasnya tetap terikat pada ketepatan proses pengambilan sidik jari manual di gerbang pertama penerimaan tahanan.

Temuan empiris mendukung kesimpulan tersebut. (Silitonga Poltak Saud et al., 2021) dalam penelitian yang dipublikasikan International Journal of Management menemukan bahwa peningkatan kualitas data registrasi berbasis SDP di Lapas Kelas I di Jawa Timur secara langsung meningkatkan akuntabilitas lembaga dan mengurangi potensi sengketa atas hak-hak tahanan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada kualitas proses registrasi termasuk pengambilan sidik jari yang akuratmemberikan dampak jangka panjang yang jauh melampaui sekadar kelengkapan berkas administratif. Setiap cetakan sidik jari yang diambil dengan benar adalah jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam wujud yang paling konkret.

Dari perspektif teori administrasi publik, (Engkus et al., 2021) menempatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai dua nilai inti yang harus terwujud dalam setiap proses birokrasi pemerintahan. Dalam konteks registrasi Rutan, akuntabilitas berarti pencatatan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara transparansi berarti ketersediaan data yang dapat diakses oleh pihak yang berwenang, termasuk keluarga dan penasihat hukum orang tahanan. Kualitas pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan tidak dapat diukur semata dari efisiensi prosedural; dimensi kemanusiaan dalam setiap interaksi pelayanan sama pentingnya dan pengambilan sidik jari yang dilakukan dengan cara yang bermartabat adalah salah satu cerminan dimensi tersebut.

Konsep tertib administrasi dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan mencakup tiga dimensi utama yaitu kepatuhan terhadap prosedur, keakuratan data, dan keamanan penyimpanan dokumen (Sumartini Siti R et al., 2024). Ketiga dimensi ini saling bergantung satu sama lain, kelemahan pada salah satu dimensi akan berdampak pada keseluruhan sistem. Misalnya, kesalahan dalam pengambilan sidik jari pada tahap awal registrasi dapat menyebabkan masalah identifikasi yang serius di kemudian hari, termasuk potensi kesalahan penanganan yang merugikan orang tahanan maupun sistem peradilan secara keseluruhan. (Sumartini Siti R et al., 2024) menambahkan bahwa tertib administrasi yang baik juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam lembaga penahanan yang menjadikannya bukan sekadar urusan teknis-administratif, melainkan juga persoalan keadilan yang menyentuh langsung nasib orang-orang yang paling rentan dalam sistem hukum. Reformasi birokrasi pemasyarakatan yang sedang berjalan pun turut menghadirkan tekanan tersendiri. Ketimpangan kapasitas SDM antarunit pelaksana teknis masih menjadi hambatan nyata dalam modernisasi administrasi pemasyarakatan Indonesia.

Permasalahan administrasi registrasi yang kompleks ini bukan monopoli satu lembaga. (Assa et al., 2024) dalam kajian prosedur penerimaan narapidana di Lapas menemukan bahwa meski regulasi registrasi telah tersedia lengkap, implementasinya masih menghadapi kendala nyata: kelebihan kapasitas hunian dan integrasi yang belum optimal antara berkas fisik dan sistem digital. Temuan ini memperkuat argumen bahwa persoalan registrasi di lembaga pemasyarakatan Indonesia bersifat

sistemik, bukan sekadar masalah teknis satu unit, dan karenanya membutuhkan solusi yang melibatkan berbagai pihak termasuk keterlibatan aktif perguruan tinggi melalui program magang mahasiswa.

Di tingkat lokal, Rutan Kelas I Surabaya sebagai salah satu unit pelaksana teknis terbesar di Jawa Timur menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengelolaan registrasi tahanan. Dengan kapasitas hunian yang besar dan dinamika penerimaan tahanan baru yang tidak menentu setiap harinya, Unit Registrasi dituntut untuk bekerja secara efisien tanpa mengorbankan akurasi dan ketepatan prosedur. Kondisi ini sering kali menciptakan tekanan kerja yang tinggi bagi petugas registrasi, terutama pada hari-hari dengan jumlah penerimaan yang di atas rata-rata. Di sinilah kehadiran mahasiswa magang sebagai tenaga pendukung terlatih menjadi sangat relevan dan berdampak nyata.

Program magang mahasiswa Program Studi Administrasi Negara di Rutan Kelas I Surabaya merupakan implementasi nyata dari konsep pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning). (Fardhan et al., 2026) dalam Journal of Sustainable Community Development menegaskan bahwa program magang yang terstruktur dengan baik dapat menjadi model pengabdian masyarakat yang aplikatif, berkelanjutan, dan dapat direplikasi untuk memperkuat kapasitas administrasi pemerintah daerah. Model ini relevan pula untuk konteks lembaga pemasyarakatan: kehadiran mahasiswa magang di Unit Registrasi Rutan bukan sekadar membantu menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk, melainkan juga mentransfer pengetahuan akademis ke dalam praktik nyata sebuah pertukaran yang menguntungkan kedua belah pihak.

Khususnya mengenai pengambilan sidik jari manual, perlu dipahami bahwa meskipun SDP Ditjenpas telah menyediakan fitur identifikasi biometrik digital, dokumen fisik berupa kartu sidik jari tetap dipersyaratkan sebagai bagian resmi dari berkas registrasi. Hal ini mencerminkan pendekatan sistem ganda yang dijalankan Ditjenpas data didigitalisasi secara paralel dengan tetap mempertahankan dokumen fisik sebagai sumber otentikasi primer. Mahasiswa magang yang terlibat dalam proses pengambilan sidik jari manual dengan demikian berada tepat di titik pertemuan antara sistem lama dan sistem baru ini posisi yang strategis sekaligus penuh tanggung jawab.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk merespons tiga kebutuhan yang saling berkaitan: kebutuhan Unit Registrasi Rutan Kelas I Surabaya akan dukungan tenaga pendamping yang terampil, kebutuhan mahasiswa akan pengalaman praktis yang bermakna, dan kebutuhan sistem pemasyarakatan akan akurasi data biometrik yang lebih baik. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan: (1) mendampingi petugas Unit Registrasi Rutan Kelas I Surabaya dalam proses pengambilan sidik jari manual orang tahanan baru; (2) mendukung peningkatan ketertiban administrasi registrasi melalui kontribusi aktif mahasiswa magang; (3) mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan prosedur ke depan; serta (4) memberikan pengalaman praktis yang bermakna kepada mahasiswa dalam penerapan teori administrasi publik dan pelayanan publik di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang sesungguhnya.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Unit Registrasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya yang berlokasi di Jalan Raya Medaeng, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan nyata yang ada di unit registrasi tersebut serta adanya kesempatan yang diberikan oleh pihak Rutan kepada mahasiswa magang untuk terlibat langsung dalam proses administrasi. Kegiatan dilaksanakan selama periode magang mahasiswa Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan sasaran seluruh orang tahanan (OT) baru yang menjalani proses registrasi masuk selama periode tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara: observasi partisipatif langsung di lapangan, wawancara

informal dengan petugas registrasi mengenai SOP dan kendala yang dihadapi ,studi dokumentasi terhadap prosedur, formulir,kartu sidik jari, dan catatan registrasi yang digunakan sehari-hari.

Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi: tinta sidik jari bertipe pad ink berwarna hitam standar, kartu sidik jari format resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang memuat kolom untuk sepuluh jari, lap pembersih, formulir data identitas orang tahanan, alat tulis, dan lembar verifikasi kualitas cetakan yang digunakan sebagai alat kontrol mutu. Seluruh alat dan bahan tersebut disediakan oleh pihak Rutan sebagai bagian dari perlengkapan operasional Unit Registrasi yang berjalan setiap harinya.

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tujuh tahap berurutan. Tahap pertama adalah observasi awal, di mana mahasiswa mengamati secara menyeluruh proses registrasi tahanan baru dari awal hingga akhir tanpa intervensi langsung, dengan tujuan memahami alur kerja, pembagian tugas, dan titik-titik kritis yang memerlukan perhatian khusus. Tahap kedua adalah koordinasi dengan petugas registrasi, mencakup penjelasan SOP, pembagian peran mahasiswa dalam pendampingan, dan penetapan mekanisme komunikasi selama kegiatan berlangsung. Tahap ketiga adalah persiapan alat dan bahan sebelum sesi penerimaan OT baru dimulai, termasuk memastikan kelengkapan formulir, kondisi pad ink, dan kesiapan kartu sidik jari. Tahap keempat adalah pendampingan langsung pengambilan sidik jari, di mana mahasiswa membantu petugas dalam setiap langkah teknis pengambilan cetakan. Tahap kelima adalah pencocokan data cetakan dengan dokumen identitas OT untuk memastikan konsistensi data. Tahap keenam adalah dokumentasi dan pengarsipan seluruh hasil registrasi sesuai sistem pengarsipan yang berlaku di Unit Registrasi Rutan Kelas I Surabaya.

Persiapan → Observasi → Koordinasi → Pendampingan Sidik Jari → Pencocokan Data → Dokumentasi & Arsip

Gambar 1 Bagan Alir Kegiatan Pendampingan Registrasi Rutan Kelas I Surabaya

HASIL PEMBAHASAN

Rutan Kelas I Surabaya merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur yang mengemban fungsi penahanan bagi tersangka dan terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan. Unit Registrasi, yang berada di bawah Kepala Subseksi Registrasi, menjadi unit pertama yang bersentuhan langsung dengan setiap orang tahanan baru sejak mereka tiba. Rata-rata penerimaan OT baru berkisar antara sepuluh hingga dua puluh orang per hari, bergantung pada intensitas perkara yang masuk dari instansi penegak hukum di wilayah Surabaya Raya dan sekitarnya. Seluruh data yang dikumpulkan selama registrasi diintegrasikan ke dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Ditjenpas sebagaimana dikaji oleh (Nurohma, 2023), yang menjadikan akurasi data registrasi awal sebagai titik penentu kualitas seluruh proses pemasyarakatan selanjutnya.

Proses registrasi OT baru di Rutan Kelas I Surabaya berlangsung secara berurutan dan terstandarisasi. Prosesnya dimulai ketika petugas penerima memeriksa kelengkapan surat perintah penahanan yang dibawa oleh petugas pengantar dari Kepolisian, Kejaksaan, atau Pengadilan. Pemeriksaan ini bersifat administratif-hukum: memverifikasi keabsahan surat, kesesuaian identitas dalam surat dengan fisik OT, dan kelengkapan lampiran dokumen yang dipersyaratkan. Setelah surat dinyatakan sah dan lengkap, proses registrasi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa setiap penahanan harus didasarkan pada alas hukum yang jelas dan dapat diverifikasi.

Setelah verifikasi dokumen, OT menjalani serangkaian pendataan yang mencakup pemeriksaan kelengkapan berkas, pencocokan identitas, penandatanganan berita acara serah terima,

penggeledahan badan dan barang bawaan, pengisian formulir data diri, pengambilan data biometrik, hingga pengarsipan. Pendataan ini bersifat komprehensif karena data yang dikumpulkan tidak hanya digunakan untuk keperluan internal Rutan, tetapi juga diintegrasikan ke dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mahasiswa magang berperan aktif dalam tahap pengisian formulir dan pengambilan sidik jari, dua tahap yang membutuhkan ketelitian tinggi dan tenaga yang memadai ketika jumlah OT yang datang dalam satu waktu cukup banyak. Seluruh tahapan tersebut dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Proses Registrasi Orang Tahanan Baru di Rutan Kelas I Surabaya

No.	Tahapan	Aktivitas Utama	Petugas yang Terlibat
1	Penerimaan	Pemeriksaan surat perintah penahanan	Staf registrasi
2	Verifikasi Identitas	Pemeriksaan dokumen (KTP/SIM) dan kesesuaian dengan OT	Staf registrasi
3	Pengisian Formulir	Pendataan data diri, latar belakang, dan riwayat hukum OT	Staf registrasi
4	Pengambilan Foto	Foto wajah tampak depan dan samping kanan-kiri	Operator foto
5	Pengukuran Fisik	Tinggi badan, berat badan, ciri khas fisik	Staf registrasi
6	Pengambilan Sidik Jari	Cetakan 10 jari tangan metode manual	Staf registrasi, mahasiswa
7	Pemeriksaan Kesehatan	Pemeriksaan fisik dan kesehatan awal	Petugas kesehatan Rutan
8	Input SDP	Entri data ke Sistem Database Pemasyarakatan	Operator SDP
9	Pengarsipan	Penyusunan dan penyimpanan berkas registrasi	Staf arsip, mahasiswa

Pengambilan sidik jari manual adalah tahap yang paling membutuhkan keterampilan teknis dan kesabaran dalam seluruh rangkaian registrasi OT baru. Secara teknis, sidik jari diambil menggunakan metode ink-and-roll, yaitu dengan menggulingkan jari yang telah dilapisi tinta di atas permukaan kartu sidik jari secara merata dari sisi kiri ke sisi kanan. Metode ini, apabila dilakukan dengan tepat, menghasilkan cetakan yang memperlihatkan seluruh pola sidik jari mulai dari pola loops, whorls, hingga arches yang menjadi penanda unik setiap individu (Maltoni et al., 2022).

Langkah teknis pengambilan sidik jari manual dilakukan melalui enam urutan yang tidak boleh dibalik. Pertama, petugas memastikan pad ink dalam kondisi baik dengan kepadatan tinta yang merata. Kedua, OT diminta untuk merilekskan seluruh otot jari dan tangan agar tidak kaku saat proses pengambilan, ketegangan otot adalah penyebab utama cetakan yang tidak lengkap atau terlalu tebal di bagian tertentu. Ketiga jari digulingkan di atas pad ink dimulai dari sisi luar ibu jari menuju sisi luar kelingking dengan tekanan yang konsisten. Keempat jari kemudian digulingkan di atas kotak yang telah ditentukan pada kartu sidik jari dengan gerakan yang sama. Kelima, setelah semua sepuluh jari selesai, cetakan diperiksa secara visual satu per satu; jika ada cetakan yang tidak jelas atau sebagian tidak terpola, pengambilan ulang dilakukan setelah jari dibersihkan dengan Lap kain. Keenam, kartu

yang telah lengkap ditandatangani oleh petugas dan disimpan dalam berkas registrasi OT bersangkutan (Fardhan et al., 2026).

Keterlibatan mahasiswa magang dalam kegiatan registrasi di Rutan Kelas I Surabaya mencakup lima bidang kontribusi yang saling melengkapi. Pertama, dalam bidang persiapan administrasi, mahasiswa membantu menyiapkan dan mendistribusikan formulir identitas kepada setiap OT baru, memastikan tidak ada formulir yang tertukar, kosong, atau rusak sebelum pengisian dimulai. Kedua, dalam pendampingan teknis pengambilan sidik jari, mahasiswa membantu petugas dalam pemberian tinta, penempatan jari, dan pengambilan cetakan, terutama pada saat jumlah OT yang harus diregistrasi dalam satu sesi lebih banyak dari biasanya. Ketiga, dalam komunikasi dan penjelasan kepada OT, mahasiswa membantu menyampaikan prosedur yang akan dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami, mengurangi kecemasan OT dan meningkatkan kooperativitas mereka dalam proses registrasi. Keempat, dalam pengarsipan, mahasiswa membantu menyortir, memberi label, dan menyimpan seluruh dokumen registrasi sesuai sistem pengarsipan yang berlaku. Rincian kontribusi tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kontribusi Mahasiswa Magang dalam Kegiatan Registrasi

No.	Bidang Kontribusi	Aktivitas Konkret	Dampak yang Dihasilkan
1	Persiapan administrasi	Menyiapkan dan mendistribusikan formulir identitas	Alur registrasi lebih lancar, tidak ada formulir tertukar
2	Teknis sidik jari	Membantu pemberian tinta dan sidik jari	Proses registrasi lebih cepat pada volume penerimaan tinggi
3	Komunikasi dengan OT	Menyampaikan penjelasan prosedur kepada OT baru	Kooperativitas OT meningkat, proses lebih kondusif
4	Dokumentasi & arsip	Menyortir, memberi label, dan menyimpan berkas	Ketertiban arsip registrasi terjaga, berkas mudah ditelusuri

Selama pelaksanaan kegiatan, sejumlah kendala teknis dan nonteknis ditemukan di lapangan. Kendala-kendala tersebut beserta upaya penyelesaiannya dirangkum pada Tabel 3. Secara umum, kendala teknis terbagi menjadi dua kategori utama: kendala yang bersumber dari kondisi fisik OT, dan kendala yang bersumber dari teknik atau prosedur pengambilan itu sendiri. Untuk kategori pertama, pendekatan yang dilakukan adalah adaptasi teknik pengambilan sesuai kondisi jari masing-masing OT. Untuk kategori kedua, solusinya adalah penerapan prosedur yang lebih ketat dan pelatihan teknis tambahan bagi mahasiswa pendamping.

Tabel 3. Kendala dan Solusi dalam Pengambilan Sidik Jari Manual

No.	Kendala	Faktor Penyebab	Solusi yang Diterapkan
1	Cetakan sidik jari kurang jelas atau tidak lengkap	Jari kering, kapalan, atau memiliki luka/bekas luka	Bersihkan jari dengan tisu lembab, tunggu hingga kering; ulangi pengambilan dengan tekanan lebih terukur
2	Tinta tidak terdistribusi merata pada cetakan	Teknik pemberian tinta dan penggulungan jari yang kurang konsisten	Perketat prosedur pemberian tinta, pastikan distribusi merata di seluruh permukaan jari sebelum pengambilan
3	Pola sidik jari sulit terbaca (OT lansia)	Perubahan tekstur dan elastisitas kulit akibat usia lanjut	Gunakan metode tekan langsung (press method), kartu ditekan ke permukaan jari, bukan jari yang digulingkan
4	OT tidak kooperatif atau menolak prosedur	Kecemasan, ketidaktahuan tentang prosedur, atau trauma psikologis	Pendekatan komunikasi persuasif; jelaskan tujuan dan manfaat prosedur secara sederhana dan humanis
5	Formulir tidak lengkap saat registrasi	Data identitas OT belum tersedia secara lengkap dari instansi pengirim	Catat data yang tersedia terlebih dahulu, lakukan koordinasi dengan instansi pengirim untuk melengkapi data

Kegiatan pendampingan pengambilan sidik jari manual di Rutan Kelas I Surabaya dapat dipahami secara lebih mendalam melalui kerangka teori administrasi publik dan pelayanan publik. Dari perspektif teori birokrasi Weber, salah satu ciri birokrasi yang ideal adalah adanya sistem dokumentasi yang komprehensif, imparsial, dan terstandarisasi (Muallif, 2023). Proses registrasi OT di Rutan Kelas I Surabaya secara nyata mencerminkan ciri-ciri tersebut, setiap tahap memiliki prosedur yang baku, setiap dokumen memiliki format yang seragam, dan setiap petugas memiliki tugas yang jelas dan tidak tumpang tindih. Keterlibatan mahasiswa dalam sistem ini tidak mengubah struktur birokrasi yang ada, melainkan memperkuat kapasitas pelaksanaannya.

Dari sudut pandang teori pelayanan publik, enam prinsip utama pelayanan publik yang baik: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Proses registrasi yang dilaksanakan di Rutan Kelas I Surabaya, dengan pendampingan mahasiswa magang, menunjukkan pemenuhan terhadap setidaknya empat dari enam prinsip tersebut. Transparansi terwujud melalui penjelasan prosedur kepada OT sebelum pelaksanaan. Akuntabilitas terjaga melalui pencatatan dan pengarsipan yang terstruktur. Kesamaan hak ditunjukkan melalui penerapan prosedur yang sama bagi seluruh OT tanpa pengecualian. Partisipatif tercermin dalam keterlibatan mahasiswa sebagai mitra aktif proses pelayanan.

Konsep tertib administrasi yang dikemukakan oleh (Sumartini Siti R et al., 2024) relevan dalam memahami signifikansi kegiatan ini. Tertib administrasi bukan sekadar tentang kerapian berkas atau kepatuhan prosedural melainkan cerminan dari budaya organisasi yang mengedepankan akurasi, integritas, dan rasa tanggung jawab terhadap data publik. Di Rutan Kelas I Surabaya, upaya menjaga tertib administrasi dalam proses registrasi memiliki implikasi hukum yang sangat nyata, data yang

akurat melindungi hak-hak OT, memudahkan penelusuran kasus oleh aparat penegak hukum, dan mencegah terjadinya kesalahan identifikasi yang dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.

Sidik jari tetap menjadi modalitas biometrik yang paling dapat diandalkan dalam kondisi keterbatasan infrastruktur digital, karena tidak membutuhkan koneksi internet, tidak bergantung pada ketersediaan daya listrik untuk penyimpanan, dan memiliki nilai pembuktian hukum yang kuat sebagai dokumen fisik. Temuan ini sejalan dengan realitas yang ditemukan selama kegiatan pengabdian, pengambilan sidik jari manual bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan tindakan pembuktian identitas yang memiliki konsekuensi hukum langsung bagi setiap OT yang memasuki sistem pemasyarakatan.

Hasil kegiatan ini sejalan dengan temuan (Harisda et al., 2025) yang menyimpulkan bahwa program magang mahasiswa administrasi publik di lembaga pemasyarakatan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas administrasi lembaga. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa pendekatan pengabdian berbasis praktik langsung (hands-on community service) lebih efektif dalam memperkuat kompetensi mahasiswa dibandingkan dengan pendekatan observasi pasif. Pengalaman berhadapan langsung dengan OT, memahami dinamika kerja Unit Registrasi, dan menghadapi kendala teknis di lapangan membentuk kematangan profesional mahasiswa yang tidak ternilai. Kegiatan ini membuktikan bahwa program pengabdian berbasis magang langsung menghasilkan nilai tambah yang terukur baik bagi lembaga yang dilayani maupun bagi mahasiswa yang terlibat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pengambilan sidik jari manual dalam proses registrasi orang tahanan baru di Rutan Kelas I Surabaya telah terlaksana secara efektif dan memberikan dampak positif yang dapat diukur secara langsung. Proses registrasi berlangsung lebih lancar, ketertiban administrasi meningkat, dan akurasi data identitas orang tahanan lebih terjaga berkat keterlibatan aktif mahasiswa magang sebagai tenaga pendukung terlatih. Temuan ini menegaskan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pemerintah, khususnya melalui program magang yang terstruktur, menghasilkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi kedua pihak, Rutan mendapatkan dukungan kapasitas yang dibutuhkan, sementara mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang memperkaya pemahaman mereka tentang administrasi publik dan pelayanan publik dalam konteks yang sesungguhnya. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran diajukan: pihak Rutan Kelas I Surabaya disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan teknis berkala bagi petugas registrasi terutama untuk menangani kasus-kasus khusus seperti OT lansia dan melembagakan program magang melalui perjanjian kerja sama formal dengan perguruan tinggi agar kesinambungan programnya terjamin. Sementara bagi perguruan tinggi, kegiatan serupa layak dijadikan model pengabdian yang dapat direplikasi di berbagai UPT pemasyarakatan lain sebagai bagian dari kurikulum berbasis pengalaman yang terstruktur dan berdampak.

DAFTAR PUSTAKA

Assa, N. I., Lembong, R. R., & Wullur, N. (2024). ANALISIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DALAM PENANGANAN NARAPIDANA DI LAPAS. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, *13*(5). https://www.kompasiana.com/rat/5d1ac4f9097f36506c1afc

Engkus, Azan Rachmadianty Ainyna, Hanif Alliadzar, & Fitri Tiara Anisa. (2021). MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial, 19*(1).

Fardhan, T., Pratama, N., Rasyid Syamsuri, A., Halim, A., & Siddik, E. (2026). Program Magang Mahasiswa sebagai Model Pengabdian dalam Penguatan Tata Kelola Administrasi Publik Daerah. *Journal of Sustainable Community Development*, *4*(1). https://doi.org/10.60036/74sg2x02

Harisda, Wajdi Farid M, Sara Alda, Riskawati, Muttia Ririn, Nurmala Dewi A, & Hasdiana. (2025). KONTRIBUSI MAHASISWA MAGANG SEBAGAI BAGIAN DARI PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK DI KEJAKSAAN NEGERI PAREPARE. *Akademik Pengabdian Masyarakat*, *3*(1), 264–269. https://doi.org/10.61722/japm.v3i1.3768

Maltoni, D., Maio, D., Jain, A. K., & Feng, J. (2022). Handbook of fingerprint recognition: Third edition. In *Handbook of Fingerprint Recognition: Third Edition*. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83624-5

Mendela Rules. (2016). *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*.

Muallif. (2023, September 27). *Analisis Konsep Birokrasi Menurut Max Weber: Definisi, Ciri-ciri, Kelebihan, Kekurangan, dan Penerapan – Blog UI An Nur Lampung*. https://an-nur.ac.id/blog/analisis-konsep-birokrasi-menurut-max-weber-definisi-ciri-ciri-kelebihan-kekurangan-dan-penerapan.html

Nurohma, S. I. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Guna Mewujudkan Good Governance Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Private Law*, *5*(3), 956–969. https://doi.org/10.59818/jps.v2i2.580

Oktianatasari, H., Firdaus Mahmudy, W., Rahayudi, B., Studi, P., & Komputer, I. (2008). *AUTOMATED FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM DENGAN TEKNIK MINUTIAE-BASED*. *4*(2), 67–75.

Silitonga Poltak Saud, R., Hakim, A., Said, A., & Siswidiyanto. (2021). EFFORTS TO IMPROVE THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES WITH CORRECTIONAL DATABASE SYSTEMS: AN EMPIRICAL STUDY OF CLASS I CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN JAVA INDONESIA. *International Journal of Management (IJM)*, *12*(3), 964–975. https://doi.org/10.34218/IJM.12.3.2021.090

Soediro, O. : (2019). PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN PIDANA AMERIKA SERIKAT DENGAN PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *KOSMIK HUKUM*, *19*(1). http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/sistem-peradilan-di-indonesia.html,

Sumartini Siti R, Arifin Jajang, Suhendra Abas, & Didi Nursidi. (2024). *IMPLEMENTASI TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RELEVANSI- NYA DENGAN KONSEP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM KONSEP NEGARA HUKUM*. 16–30.